



# Buletin Parlementaria

Nomor 1189/1/III/2022 • Maret 2022



## DPR Beri Catatan Penyelesaian Penertiban Kebun Sawit Ilegal di Riau



3 Puan Maharani:  
Dukungan Indonesia  
di Resolusi PBB  
Sesuai Konstitusi



4 Muhaimin Iskandar:  
Indonesia Maju Jika  
Kebudayaan Jadi  
Panglima Pembangunan



9 772614 339005

# DPR Beri Catatan Penyelesaian Penertiban Kebun Sawit Ilegal di Riau



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi saat memimpin Rapat Kerja Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI dengan Gubernur Riau, Bupati/Wali Kota se-Riau, serta mitra kerja terkait. Foto: Jaka/nvl

**W**akil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi memberikan sejumlah catatan terkait penyelesaian penertiban kebun sawit ilegal di kawasan hutan Provinsi Riau. Direktur Jenderal Planologi, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menyatakan ada 1,4 juta hektare kebun sawit yang ilegal di Riau, sedangkan data yang dimiliki Gubernur Riau terdapat sekitar 1,8 juta hektare kebun sawit ilegal.

“Saya merekomendasikan terkait perbedaan data ini, harus

ada rekonsiliasi data dimulai dari tingkat kabupaten/kota segera melakukan pendataan, nanti berkoordinasi dengan KLHK dalam hal ini Dirjen Planologi untuk memetakan area perkebunan sawit ilegal. Karena kalau dari petanya ilegal itu ada, tapi nama pemiliknya yang tidak muncul. Tentu ini harus dimunculkan siapa kepemilikannya, tidak boleh ada manipulatif terhadap data kepemilikannya itu,” ujar Dedi saat memimpin Rapat Kerja Tim Kunker Reses Komisi IV DPR RI dengan Gubernur Riau, Bupati/Wali Kota

se-Riau, dan mitra kerja terkait, di Pekanbaru, Riau, Senin (7/3).

Ditambahkan politisi Partai Golkar ini, setelah pendataan selesai, Ditjen Planologi KLHK dapat melakukan langkah penanganan dengan berkoordinasi bersama Ditjen Penegakan Hukum (Gakkum). Sehingga nantinya dapat diputuskan, apakah lahannya dikembalikan menjadi kawasan hutan atau perusahaan dikenakan denda untuk membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada negara, kemudian hasil sawitnya dilegalisasi.

“Selain itu, ada konsekuensi pembiayaan yang ditimbulkan karena diperlukan biaya operasional bagi para petugas desa di lapangan, kita berharap Dirjen Planologi membuat rancangan itu, mudah-mudahan di anggaran perubahan bisa kita masukan, untuk itu fokus kita ke Riau dulu *deh*. Karena kalau Riau itu selesai, setengah dari data se-Indonesia ini sudah beres. Saya juga mendorong perkebunan sawit rakyat yang ada di kawasan hutan juga harus dilegalisasi, sehingga nanti mereka mendapatkan porsi untuk dilakukan peremajaan,” pungkas Dedi.

Dedi juga mendorong agar PNBP bersifat keadilan, yaitu dengan memberikan ruang bagi insentif provinsi dan kabupaten/kota sebagai objek dari pengelolaan areal perkebunan ilegal. “Kalau kita bicara berkuat pada masa lalu, maka kita tidak akan pernah selesai menghadapi masa depan. Saya yakin kalau bicara korporasi, apalagi areal hutan yang puluhan ribu hektar dan ratusan ribu hektar level setingkat bupati akan kesulitan. Karena bagaimanapun korporasi di seluruh Indonesia mesti membawa nama Jakarta sebagai pusatnya,” imbuh Dedi.

Terakhir, legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Barat VII ini juga mengungkapkan, Ditjen Planologi KLHK telah berkomitmen melakukan jemput bola dan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis, terkait mekanisme tata kelola pengelolaan area sawit ilegal ini kepada jaringan yang paling bawah agar dapat diketahui. ■ jk/sf



# Puan Maharani: Dukungan Indonesia di Resolusi PBB Sesuai Konstitusi



Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani. Foto: Ist/nvl

**K**etua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani mengatakan dukungan Indonesia terhadap Resolusi Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang menyesalkan agresi Rusia kepada Ukraina sudah sesuai konstitusi negara. Resolusi PBB yang disetujui 141 dari 181 negara itu memuat poin menyesalkan agresi Rusia kepada Ukraina. Resolusi ini menuntut penyelesaian dalam istilah yang paling keras atas agresi Rusia terhadap Ukraina.

“Sikap Pemerintah sudah sesuai dengan UUD 1945 yang mengamatkan agar Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” kata Puan dalam keterangan tertulis yang diterima *Parlementaria*, Jumat (4/3).

DPR RI, lanjut Puan, sepatutnya dengan pemerintah dalam mendukung Resolusi Majelis Umum PBB terkait agresi Rusia kepada Ukraina. Puan juga mengapresiasi sikap pemerintah yang ikut menekan Resolusi PBB itu. Puan menegaskan, kemerdekaan merupakan hak segala bangsa. Oleh sebab itu, segala bentuk penjajahan di atas dunia harus dihapuskan

karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan.

Sikap tegas dari negara-negara dunia, menurut Puan, sudah seharusnya dikeluarkan, meskipun Resolusi PBB tidak mengikat secara hukum. Puan menambahkan, resolusi PBB yang didukung Indonesia juga meminta agar Rusia segera menghentikan penggunaan kekuatan militernya terhadap Ukraina tanpa syarat apa pun. Resolusi itu sebagai refleksi atas opini internasional terhadap agresi Rusia ke Ukraina.

“Tentunya Resolusi tersebut sesuai dengan isi Piagam PBB yang bertekad untuk menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang. Karena perang membawa derita yang tak bisa diungkapkan bagi kemanusiaan,” ungkap mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu. ■ ann/sf



## PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR RI

### KETUA PENGARAH

Ir. Indra Iskandar, M.Si (Sekretaris Jenderal DPR RI)

### PIMPINAN PELAKSANA

Dr. Indra Pahlevi, S.I.P., M.Si, (Karo Pembertitaan Parlemen)

### PIMPINAN REDAKSI

Irfan S. Sos, MMSI (Kabag Media Cetak)

### W.K PIMPINAN REDAKSI

Sugeng Irianto S.Sos, M.A. (Kabag Media Cetak)  
Suciati, S.Sos. (Kabag Media Analisis)  
Nita Juwita, S.Sos. (Kabag MedSos dan Website)

### REDAKTUR

Erman Suhendri, S.Sos.I, Sofyan Efendi

### REDAKTUR FOTO

M. Andri Nurdiansyah

### SEKRETARIS REDAKSI

Guntur Dewanto, Andi Nurul Nauval Ramadhina, A.Md.Ds

### ANGGOTA REDAKSI

Rizka Arinindya, S.Sos, Ridwan Budiman, S.I.P, Agung Hidayat, S.I.P, Tiara Saum, S.I.Kom, Hira Askamal, S.I.Kom, Bianca Destianty, S.I.Kom, Yhusanti Pratiwi Sayogo, S.I.Kom, Wilga Emilson, S.Sos., Ananda Galuh Pawestri, S.I.Kom, Nadeh Ivan, S.I.Kom., Ubaid Faurizal, S.I.Kom, Shane Savera Sa'diyah, S.I.Kom., Rahayu Setyowati, Muhammad Husen, Virgianne Meiske Patulli, Ria Nur Mega, Devi Iriandi, Surahmat Eko Budi Setianto, Taufan Syahrullil, Puntho Pranowo, Singgih Kinanti Rimmbani, Siti Nadiyah, Nafsa Hanum Alaydrus, Bunga Leonniricha Firsta Dystie, Baggys Maeshyntha, Anju Alfonce Sitompul, Zulfikar Mubien

### FOTOGRAFER

Prima Danutirto, A.Md, Naefuroji, Jaka Nugraha, Runi Sari Budianti, Arief Rachman, R. Kresno PD. Moempoeni, Azka Restu Afdhillah, Gerald Opie, Hasri Mentari, Friederick Munchen

### ANALIS MEDIA

Supian, S.E, Natasya Amanda Prihandini, S. Kom, Larissa Amanda Indianti Siahaan, S.I.P, Eki Baehaki, S.Sos, M. Rizki Ramadhan, S.I.Kom, M. Rizki Nugraha, Sunarya, Fahmi Harfa, Safitri Restu Widoyowati, Rosnita, Yoga Achmad Fauzan, Intan Putri Suciaini, Riska Ramadhani

### INFOGRAFIS

Tiara Annisa, Chasbi Chusna Mulia, Dipa Natalio, Aisyah Salmah, Dewa Pratama, Estu Mega Nurjanah Putri

### ADMINISTRASI

Suhendi, Lutfi Suci Nur'aini, Damar Maulana Taher, Fitrianto

## PENERBITAN

### PIMPINAN PENERBITAN

Djoko Hanggoro, ST (Kabag Penerbitan)

### PENANGGUNG JAWAB PRODUKSI

Mediantoro, S.E (Kabag Produksi)

### DESAIN GRAFIS

Dito Sugito, Ihsan Syahrevi, Aan Risdiana, M.Kom

### IT MEDIA DIGITAL

Muhamad Hendar Assifa, S.Kom, Savant Rifqi Hidayat, S.E

### PENANGGUNG JAWAB DISTRIBUSI

Eny Sulistiwati, S.Kom (Kabag Distribusi)

### KOORDINATOR DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Yudi Kresna

### ADMINISTRASI

### STAF DISTRIBUSI DAN SIRKULASI

Handhal Dwi Akbar, Nabila Khairunissa, Made Chrisna Dwipa

Telp. 021-571 5697 Fax. 021-571 5421

Email : bag\_penerbitan@dpr.go.id

ISI BERITA DAN MATERI FOTO  
DILUAR TANGGUNG JAWAB BAGIAN PENERBITAN  
HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN HASIL  
CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)



Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar saat menyerap aspirasi seniman PasSKI. Foto: Ist/nvl

# Muhaimin Iskandar: Indonesia Maju Jika Kebudayaan jadi Panglima Pembangunan

**W**akil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Korkesra) Abdul Muhaimin Iskandar mengakui peran besar seniman dalam menciptakan dan membangun karakter kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Ia menyebut dua indikator suksesnya pembangunan, yaitu kebahagiaan dan kesejahteraan.

“Seniman ini jasanya sangat besar membangun karakter menciptakan kehidupan yang sukses. Sebab pembangunan itu tujuannya dua, bahagia dan sejahtera,” kata Gus Muhaimin saat serap aspirasi seniman Mataraman di Padepokan Seni Kirun (PasSKI) Madiun, Jawa Timur, Sabtu (5/3).

Orientasi pembangunan yang hanya diarahkan pada infrastruktur ia sebut belum menjadi indikator suksesnya pembangunan jika kebahagiaan

masyarakat belum terakomodir. “Salah satu indikator suksesnya pembangunan adalah kebahagiaan dan kesejahteraan. Dan kalau sudah *ngomong* kebahagiaan itu cuma ada dua, seni dan agama,” kata Gus Muhaimin.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menambahkan, agama dan seni adalah dua kekuatan yang paling berjasa besar melahirkan kebahagiaan dan turut berkontribusi dalam menyukseskan pembangunan. “Dari eksisnya seniman

dan agamawanlah suksesnya pembangunan di Tanah Air. Contohnya apa? Vaksinasi kalau tidak ada hubungan agama akan sulit dicapai. Kita tahu banyak pandangan-pandangan miring soal vaksin, untung ada NU, untung ada ulama-ulama Indonesia,” tutur Gus Muhaimin.

Selain itu, keponakan Presiden RI ke-IV KH. Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menyebut kesejahteraan di Indonesia hanya bisa tercapai apabila ulama dan seniman semua bergerak untuk mendorong dan memberikan motivasi kuat bagi masyarakat. Gus Muhaimin berkisah di masa Orde Lama di bawah kepemimpinan Soekarno politik dijadikan Panglima pembangunan dan penyatuan bangsa.

Kemudian era Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto panglima pembangunan berubah menjadi ekonomi. “Tapi sekarang budaya adalah panglima, karena sebetulnya politik dan ekonomi tidak boleh dipilah-pilah. Jadi Indonesia akan maju apabila kebudayaan menjadi panglima pembangunannya,” tegas Gus Muhaimin. ■ sf

# Bertemu Muslimat NU dan Santri di Sumenep, Puan Maharani Bicara Trilogi Ukhuwah



Ketua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani dan Gubernur Jawa Timur saat bersilaturahmi dengan Muslimat NU dan santri di Sumenep. Foto: Eno/nvl

**K**etua DPR RI Dr. (H.C) Puan Maharani bersilaturahmi dengan Muslimat Nahdlatul Ulama (NU) dan santri di Pondok Pesantren Da'arut Thayyibah, di Kabupaten Sumenep, Provinsi Jawa Timur. Kehadiran Puan di Ponpes Da'arut Thayyibah, Kamis (3/3), disambut hangat oleh para santri yang menunggunya di pinggir jalan sambil melantunkan salawat. Ponpes ini memiliki 600 siswa mulai dari TK hingga Aliyah (SMA).

Puan sempat berkeliling melihat pondok pesantren didampingi oleh pimpinan Ponpes Da'arut Thayyibah, Nyai Hj. Thayyibah. Kehadiran Puan didampingi oleh Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa yang juga Ketua Umum Muslimat NU, Bupati Sumenep Achmad Fauzi, serta Anggota DPR RI Said Abdullah dan Ahmad Basarah. Dalam silaturahmi ini, hadir 1.000 anggota Muslimat NU dan 500 warga NU laki-laki.

“Dalam kesempatan yang baik ini, saya atas nama pribadi, Ketua DPR RI, mengucapkan selamat hari lahir ke-96 NU. Semoga NU terus menjadi bagian penting dan garda terdepan penjaga Pancasila dan NKRI sesuai ajaran Islam *Ahlussunnah Waljama'ah*,” ujar Puan dalam keterangan pers yang diterima **Parlementaria**, Kamis (3/3). Seluruh rangkaian kegiatan dilaksanakan dengan protokol kesehatan (prokes) yang ketat.

Cucu Proklamator sekaligus Presiden pertama Indonesia Sukarno itu mengaku bangga bisa bersilaturahmi dengan keluarga NU di Ponpes Da'arut Thayyibah. Puan menyatakan ingin mengikuti jejak kedekatan sang Kakek dengan NU sejak era kemerdekaan dulu. “Saya datang untuk meneruskan silaturahmi Bung Karno dengan warga Nahdliyin, khususnya Muslimat NU. Ini pertemuan pertama, Insya Allah bukan yang terakhir,” ungkapnya.

“Saya merasa ini bagian dari rumah saya karena keramahaan Nyai dan para Muslimat. Ini seperti datang ke rumah saya. Dengan silaturahmi ini saya minta doa kepada yang hadir agar Indonesia ke depan jadi lebih baik,” tambah Puan. Mantan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) itu pun memuji peran Muslimat NU dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan cita-cita nasional secara mandiri.

Apalagi Muslimat NU bergabung bersama elemen perjuangan perempuan lainnya, terutama organisasi yang tergabung dalam Kongres Wanita Indonesia (Kowani), sebuah federasi organisasi wanita tingkat nasional. “Visi dari Muslimat NU adalah untuk mewujudkan masyarakat sejahtera berkualitas, dijiwai ajaran Islam *Ahlussunnah Waljama'ah* dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diridhoi Allah SWT,” sebut Puan. ■ sf

# Komisi VII Prihatin Terjadinya Konflik Rusia-Ukraina

**K**etua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto prihatin terjadinya konflik bersenjata antara Rusia dan Ukraina. Ia menegaskan, apapun alasannya penggunaan militer tidak dibenarkan. Selain itu, konflik Rusia tersebut juga menimbulkan implikasi atau dampak bagi negara-negara lain, termasuk Indonesia. Di antaranya harga energi yang meningkat tajam, dimana gas bumi mencapai 775 dolar AS per metrik ton. Sementara harga minyak dunia per hari ini mencapai 130 dolar AS per barel. Sehingga membuat Pertamina menaikkan harga BBM non-subsidi.

“Rusia penyumbang minyak dunia terbesar di luar OPEC. Hampir 30 persen minyak dunia dari Rusia. Dengan adanya konflik ini tentu berpengaruh terhadap harga minyak dunia. Belum lagi, berbagai proyek kerja sama di bidang energi antara Rusia dan Indonesia. Akibat konflik tersebut, barat melakukan *banned* produk Rusia. Hal ini mungkin saja ikut terkena imbas. Salah satunya proyek Pertamina Rosneft di Tuban, Jawa Timur. Saya berharap proyek ini terus jalan dan tidak terpengaruh konflik Rusia,” papar Sugeng usai menerima Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (7/3).

Oleh karenanya, politisi Partai NasDem ini berharap, agar ada dialog antara kedua belah pihak. Sehingga konflik Rusia-Ukraina dapat segera disudahi, dan perdamaian pun dapat kembali tercipta. Meski sempat dikatakan oleh Presiden Rusia Vladimir Putin bahwa target serangan Rusia sejatinya hanya militer Ukraina, namun tidak dapat dipungkiri serangan itu juga mengenai warga sipil yang tidak bersalah.

Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Lyudmila Georgievna Vorobieva menjelaskan Rusia terpaksa mengambil jalan tersebut didesak situasi terpojok. Dimana eskalasi kekuatan Barat, dalam hal ini NATO, yang membangun afiliasi dengan Ukraina. Berkali-kali Rusia memberi peringatan terhadap Ukraina, agar jangan sampai ada militerisasi yang berjarak hanya beberapa miles dari Moskow. Tapi peringatan itu diabaikan dan tetap dibangun kekuatan barat secara terang-terangan. Di antaranya dengan dikirim peralatan militer, latihan militer antara Ukraina dan NATO. Hal ini menunjukkan Ukraina menjadi bagian dari Barat untuk merongrong kewibawaan Rusia. ■ ayu/sf



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto saat bertukar cenderamata dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia. Foto: Oji/nvl



# Komisi VIII Pantau Pencairan dan Penyaluran Bansos di Manggarai Barat

(BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST) sebagai bentuk perhatian pemerintah bagi masyarakat yang terkena pandemi Covid-19,” kata Ace sesuai melakukan penyaluran bantuan sosial dari Kemensos, di Kantor Bupati Manggarai Barat, NTT, Selasa (22/2).

Ace mengatakan, Komisi VIII DPR RI selalu mendukung program bansos, terutama Program ATENSI, dimana dana tersebut diperuntukkan kepada anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya akibat pandemi Covid-19. “Tadi diserahkan untuk anak tersebut diberi

bantuan Rp200.000 per bulan. Alasan kami mendukung program ATENSI ini karena anak yatim piatu itu dilindungi oleh negara, fakir miskin dilindungi negara, itu adalah kewajiban konstitusi. *Adek-adek* juga tidak boleh putus sekolahnya. Jadi *adek-adek* tersebut harus terdaftar dalam program Kartu Indonesia Pintar (KIP), harus terdata di program PKH, terutama kelompok disabilitas,” pesan Ace.



Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB Ace Hasan Syadzily saat memantau penyaluran bansos. Foto: Kiki/nvl

**T**im Kunjungan Kerja Reses Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI TB

Ace Hasan Syadzily melihat secara langsung pencairan dan penyaluran program-program bantuan sosial dari Kementerian Sosial untuk masyarakat di Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Adapun sejumlah program-program tersebut adalah Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) untuk 16.142 KPM senilai Rp15.030.900.000; Bantuan ATENSI untuk anak yatim untuk 13 orang senilai Rp11.300.000,

bantuan aksesibilitas untuk 18 orang senilai Rp43.800.000, bantuan kebutuhan dasar Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) untuk 11 orang senilai Rp5.500.000; dan Bantuan Sosial Program Sembako tahun 2022 periode Januari-Maret untuk 13.258 KPM senilai Rp7.954.800.000.

“Komisi VIII DPR RI melihat secara langsung bagaimana program dari Kementerian Sosial yang dialokasikan untuk Kabupaten Manggarai Barat. Ada banyak program-program bantuan sosial dari Kementerian Sosial, misalnya ada Program Keluarga Harapan (PKH), Program Bantuan Pangan Non-Tunai

Selain itu, Ace menekankan kepada Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur agar selalu melakukan pemuktahiran data-data penerima bantuan kepada Kementerian Sosial. Sehingga bantuan-bantuan sosial tersebut betul-betul sampai dan tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkannya.

“Kami juga mendorong kepada pemerintah daerah agar proses pemuktahiran data dilakukan secara *update* kepada Kementerian Sosial supaya nanti jangan sampai ada kesalahan data,” pesan politisi Partai Golkar tersebut. ■ **qq/sf**

# Yahya Zaini Nilai Inpres Nomor 1 Tahun 2022 Tidak Relevan

**A**nggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini menanggapi Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang menuai sorotan di tengah masyarakat. Yahya menilai, Inpres yang diteken Presiden Jokowi itu dinilai tidak relevan jika dijadikan persyaratan ketika masyarakat mengurus berbagai hal, seperti membuat SIM dan SKCK, proses jual beli tanah hingga menjadi syarat untuk keberangkatan umrah.

“Menurut saya banyak pelayanan yang semestinya tidak dijadikan syarat. Misalnya orang di kelas menengah ke atas umumnya kan mereka tidak menjadi peserta BPJS karena mereka menjadi peserta asuransi swasta. Masa mereka harus dipersyaratkan membeli tanah harus mendaftar (BPJS) dulu, padahal (BPJS) *enggak* dipakai. Jadi menurut saya tidak relevan. Harus dicari terobosan-terobosan yang memang lebih tepat dan tepat sasaran,” katanya di sela-sela agenda kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI di Provinsi Gorontalo, Selasa (22/2).

Politisi Partai Golkar itu menjelaskan memang tujuan inpres ini dalam rangka *universal head coverage* yang dimana, sampai sekarang kepesertaan BPJS Kesehatan baru mencapai 86 persen, dan ditargetkan pada tahun 2024 mencapai 98 persen. Yahya menilai, seharusnya

pemerintah memiliki upaya-upaya yang sistematis dan intensif, ketimbang menerapkan BPJS Kesehatan menjadi syarat diberbagai hal.

“Memang semestinya ada upaya-upaya yang sistematis dan instensif, tetapi Inpres yang keluar inikan dilihat cukup memberatkan masyarakat. Karena memang banyak pelayanan yang tidak terkait langsung dengan masalah kesehatan, sehingga yang perlu dipikirkan adalah cara yang efektif untuk meningkatkan kepesertaan (BPJS

Kesehatan),” papar legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur VIII itu.

Yahya mencontohkan, misalnya pemerintah mencari terobosan ke peserta bukan penerima upah (PBPU) yaitu peserta BPJS Kesehatan yang mandiri. Kemudian yang kedua dengan meningkatkan penerima bantuan iuran (PBI), mengingat PBI saat ini, masih banyak orang yang tidak mampu dan belum tercover oleh PBI di lapangan.

“Contoh di dapil saya misalnya, banyak sekali orang yang tidak mampu yang belum menjadi peserta PBI, karna data PBI ini berasal dari DTKS dari Kemensos yang menghimpun datanya adalah kepala dinkes di masing-masing kabupaten kota. Sedangkan dinkes sumber datanya adalah dari kepala desa. Kalau kepala desanya objektif mungkin tidak ada masalah, tapi karena kepala desanya tidak objektif ini menjadi masalah. Sehingga orang yang didaftarkan menjadi peserta PBI ini

orang yang tidak tepat, itu yang kita hadapi di lapangan,” tutup Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI tersebut. ■  
ndy/sf

Anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini. Foto: Nadya/nvl





# Tak Hanya Pengawasan, BPOM Harus Berikan Penguatan di Luar Tupoksi Reguler



Anggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama saat mengikuti kunker Komisi IX DPR RI. Foto: Chasbi/mvi

**A**nggota Komisi IX DPR RI Ade Rezki Pratama menilai bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) harus bisa menjadi perpanjangan tangan pemerintah. Tidak hanya melakukan pengawasan terhadap obat-obatan, kosmetik, vitamin, makanan, minuman, barang siap dimakan maupun bahan baku, namun juga memberikan sebuah penguatan bahwa BPOM bisa menjadi sesuatu yang berbeda dari tupoksinya sendiri.

“Penguatan tersebut tidak hanya sebatas penguatan tupoksi reguler tetapi juga memberikan nilai plus bagi masyarakat yang ada di Manokwari dan di Papua Barat. Saya melihat bahwa banyak sekali tanaman yang

bisa menjadi suatu komoditas yang sangat tinggi baik itu bagi masyarakat sebagai produsen, baik itu dikelola secara UMKM maupun dikelola secara menengah dan besar,” kata Ade Rezki saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Manokwari, Papua Barat, Senin (21/2).

Politisi Partai Gerindra itu menilai hal tersebut menjadi sesuatu yang luar biasa apabila komoditas tersebut dapat dibina dan dibimbing oleh BPOM. Menurutnya, pendampingan di lembaga tersebut tentunya akan menambah peningkatan hajat masyarakat yang ada di Manokwari khususnya, dan Papua Barat secara umumnya.

“Kami melihat ada beberapa tanaman seperti buah merah, buah

pala maupun tanaman-tanaman herbal lainnya yang dapat memberikan semacam terapi obat herbal bagi pasien-pasien tertentu. Misalnya bisa memperkuat imunitas tubuh dan lain sebagainya, apalagi pada saat sekarang ini pandemi yang belum selesai. Kami kira ini menjadi sesuatu hal yang luar biasa bila BPOM bisa benar-benar memberikan daya dan upaya bagi peningkatan kesejahteraan UMKM yang ada di Papua Barat,” jelas Ade Rezki.

Komisi IX DPR RI pun telah mendatangi Kantor Balai POM yang

ada di Manokwari dan berharap agar anugerah Tuhan yang luar biasa tersebut dapat diberikan sesuatu proses pendampingan maupun cara produksi yang baik dan benar hingga pada akhirnya izin produksi dapat dikeluarkan oleh BPOM.

“Setelah kunjungan langsung ke Balai POM Manokwari, kami melihat masih perlu adanya penguatan-penguatan dari BPOM Pusat dalam rangka pemerataan fasilitas sarana dan prasarana secara bijak. Komisi IX DPR mengharapkan agar BPOM pusat dapat segera mungkin melakukan pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana dalam daya dukung terhadap pandemi ini,” tutup legislator dapil Sumatera Barat II itu. ■ cas/sf

# Venue PON XXI Harus Terintegrasi dengan Dunia Pendidikan



**JIKA VENUE PON TERSEBUT TERINTEGRASI DENGAN DUNIA PENDIDIKAN, MAKA AKAN SANGAT BERMANFAAT UNTUK MENDONGKRAK PRESTASI DAN MENGGELIATKAN SEKTOR OLAHRAGA TANAH AIR.**

**P**erhelatan Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XXI Tahun 2024 akan diselenggarakan di Aceh dan Sumatera

Utara. Saat ini pemerintah mulai merencanakan pembangunan *venue* olahraga di dua provinsi tersebut. Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Kadafi menyarankan agar pembangunan *venue* olahraga dapat diintegrasikan dengan dunia pendidikan.

“Kita belajar dari *venue-venue* olahraga di manca negara, banyak sekali negara-negara yang mengawinkan *venue* olahraga dengan dunia pendidikan,” ucap Kadafi saat mengikuti kunjungan kerja *reses* Komisi X DPR RI ke Aceh, baru-baru ini.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mencatat, banyak calon atlet lahir dari dunia pendidikan. Para atlet Indonesia saat ini usianya pun makin belia, jika *venue* PON tersebut terintegrasi dengan dunia pendidikan, maka akan sangat bermanfaat untuk mendongkrak prestasi dan menggeliatkan olahraga tanah air.

“Berkenaan dengan PON, kita saat ini mengalami masa keemasan bangsa dari bonus demografi. Tentunya hari ini adik-adik yang sekolahnya masih SD, saat 100 tahun

Indonesia merdeka, akan menjadi atlet-atlet yang mengharumkan nama bangsa nantinya,” terang Kadafi.

Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi X DPR RI Ali Zamroni berharap, baik Aceh maupun Sumatera Utara, tak boleh berdiam diri dalam pembangunan sarana dan prasarana PON. Selain gencar menyosialisasikan PON, Pemerintah Provinsi Aceh dan Sumatera Utara juga harus gencar berkonsultasi dengan pemerintah

pusat terkait pembangunan *venue* PON.

“Selain itu, adanya PON ini seperti iklan pariwisata gratis bagi dua provinsi ini. Sehingga lintas sektor harus bergandengan tangan, tidak hanya

Dinas Olahraga saja, melainkan ada Dinas Pariwisata, Ekraf dan lainnya yang harus bersinergi agar *even* ini benar-benar mampu meningkatkan UMKM di Aceh dan Sumut. Sehingga selain sukses PON itu sendiri, ekonomi masyarakat bisa meningkat di era PON itu,” harap Ali Zamroni. ■ es

Anggota Komisi X DPR RI Muhammad Kadafi. Foto: Eman/nvl



# Banyak Siswa Mengeluh PJJ Membosankan

**A**nggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki mengatakan, Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) kembali dilakukan sejumlah sekolah di Indonesia akibat situasi pandemi Covid-19, termasuk di Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Banyak siswa mengeluhkan sistem belajar daring yang dirasa membosankan.

“Beberapa waktu lalu sempat menggunakan Pembelajaran Tatap Muka Terbatas, dan saat itu para guru dan siswa merasa sangat bersemangat dan senang, tetapi kemudian ada peningkatan kasus Omicron, sehingga kembali diminta melakukan PJJ,” ungkap Zainuddin di sela-sela mengikuti agenda kunjungan kerja reses Komisi X DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi X DPR RI Agustina Wilujeng, ke Manado, Sulut, Selasa (22/2).

Politisi PAN itu menyampaikan, keluhan yang dirasakan oleh guru dan juga siswa didik yang merasa bahwa sistem Pembelajaran Jarak Jauh itu sangatlah membosankan. “Oleh karenanya kepada para guru di sini saya memberi apresiasi sebab mereka terus berusaha mencari jalan keluar agar bagaimana caranya supaya tidak terjadi rasa bosan meskipun harus belajar jarak jauh. Memang sulit mengatasi rasa bosan siswa ketika harus belajar jarak jauh itu, tetapi saya melihat guru-guru di sini semangat sekali, diantaranya berupaya dengan cara mengubah metode serta menyiapkan platformnya, bahkan disempatkan menyusun pembelajaran dalam bentuk video supaya lebih bervariasi dalam belajar,” katanya.

Zainuddin berharap pandemi Covid-19 segera berlalu agar



Anggota Komisi X DPR RI Zainuddin Maliki saat meninjau SMAN 1 Guru Lombok Kalawat. Foto: Dep/tnv

Pembelajaran Tatap Muka bisa kembali dilakukan, dan supaya tidak terjadi *learning lost*. Selain itu ia mendorong agar Kemendikbudristek memberi kesempatan pada guru-guru yang ada untuk dapat meningkatkan kompetensi dan kreatifitasnya dalam mengemas PJJ. “Oleh karena itu yang kita mendorong agar Kementerian Pendidikan menyiapkan program yang cukup bagus sehingga guru-guru kita mempunyai peluang untuk membuat PJJ yang lebih berimprovisasi, lebih

”

**MENYUSUN  
PEMBELAJARAN DALAM  
BENTUK VIDEO SUPAYA  
LEBIH BERVARIASI  
DALAM BELAJAR**

kreatif, imajinasinya kita gugah agar PJJ tetap bisa diselenggarakan dengan cara yang menyenangkan,” imbuhnya.

Saat berkesempatan menyambangi SMA Negeri 1 Guru Lombok Kalawat, Zainuddin menyatakan bahwa sarana yang ada di sekolah tersebut cukup representatif. “SMA Negeri 1 Guru Lombok Kalawat sarannya cukup representatif, gedungnya baru dan menggunakan anggaran DAU. Saya kira tidak banyak SMA yang punya lapangan yang seluas ini. Sekolah yang bagus tidak hanya sarana belajarnya tetapi juga sarana olahraga di sekolah juga harus kita nilai cukup. Kalau sekolahan sudah bisa menyiapkan tidak hanya sarana belajar dan laboratoriumnya, tetapi juga sarana olahraganya dengan berbagai cabang olahraga juga bisa disiapkan sarannya, maka saya menilai sekolahan itu bagus,” tegasnya. ■ dep/sf

# Terpilih Menjadi IKN, Legislator Optimis Pertumbuhan Ekonomi Kaltim Meningkatkan Pesat



Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo bertukar cenderamata dengan mitra kerja di sela-sela kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Kaltim. Foto: Taufan/nvl

**P**erekonomian Kalimantan Timur tumbuh 4,51 persen dibanding kuartal yang sama tahun sebelumnya menurut besaran produk domestik regional bruto (PDRB) atas harga dasar konstan 2010. Anggota Komisi XI DPR RI Andreas Eddy Susetyo menilai, perekonomian Kaltim memang menunjukkan tren yang positif, namun sangat tergantung pada sektor perdagangan terutama batu bara dengan kontribusi sebesar 51 persen.

“Jika dilihat pada 2021, ekonomi Kaltim itu memang tumbuh dan yang paling besar berkontribusi itu pada sektor perdagangan dalam hal ini batu

bara. Pada saat ini harga batu bara cenderung baik. Namun saya ingatkan jangan terlalu tergantung karena kita tidak tahu apakah harga batu bara akan terus baik nantinya,” tambahnya saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi XI DPR RI ke Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, Senin (21/2).

Kenaikan harga komoditas seperti sawit dan batu bara serta menguatnya harga di pasar internasional menjadi pendorong tumbuhnya perekonomian Kaltim pada kuartal III tahun ini. Selain itu, meningkatnya produktivitas tanaman pangan seiring datangnya musim panen juga turut mendongkrak PDRB provinsi tersebut.

Peningkatan ekonomi Kaltim juga ditopang dari sisi lapangan usaha, yaitu meliputi pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian tersebut tumbuh 6,6 persen (year of year/ yoy), sektor pertanian, kehutanan dan perikanan 2,86 persen (yoy), industri pengolahan 2,22 persen (yoy). Pencapaian tersebut mampu mendorong pertumbuhan PDRB Kaltim pada periode Juli-September 2021.

“Kita harapkan tren pertumbuhan yang positif ini terus berlanjut pada 2022 apalagi nantinya Kaltim akan menjadi Ibu Kota Negara (IKN) maka akan ada sumber-sumber pertumbuhan yang baru. Sektor perdagangan di Kaltim juga sangat bergantung dari luar daerah tentunya ini yang harus diperbaiki,” pungkask politisi PDI-Perjuangan ini. ■ tn/sf



**KENAIKAN HARGA KOMODITAS SEPERTI SAWIT DAN BATU BARA DAN Menguatnya HARGA DI PASAR INTERNASIONAL MENJADI PENDORONG TUMBUHNYA PEREKONOMIAN KALTIM PADA KUARTAL III TAHUN INI. SELAIN ITU, MENINGKATNYA PRODUKTIVITAS TANAMAN PANGAN**

**A**nggota Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro meminta seluruh potensi yang ada di Lampung seperti pertanian, industri pengolahan, minerba dan batu bara untuk terus ditingkatkan. Menurutnya, sasaran bank-bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) tidak hanya menasar/ menargetkan kalangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dan Kredit Usaha Rakyat (KUR), tapi juga membantu pemerintah untuk membidik sektor pertanian, industri pengolahan, sektor batu bara hingga industri manufaktur.

“Agar apa? Agar pendapatan pajak kita makin hari makin maksimal, sumbangan PDRB Lampung terhadap nasional itu bisa meningkat dari tahun ke tahun,” ujar Fauzi usai mengikuti rapat Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan

# Legislator Minta Himbara Rangkul Berbagai Potensi di Lampung

Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Bank Indonesia (BI), Himbara, Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo), dan Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo), di Bandar Lampung, Lampung, Senin (21/2).

“Nah, kita melihat bahwa potensi yang sangat luar biasa dimiliki

Lampung adalah penyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terbesar nomor 4 atau nomor 5 di Indonesia,” sambung politisi Partai NasDem tersebut. Fauzi menjelaskan bahwa sumbangan sektor pajak dan perpajakan itu hampir menyentuh angka Rp10 triliun per tahun, dari total pajak Indonesia yang kurang lebih di kisaran Rp1.200 triliun.

Di sisi lain, Fauzi berharap kepada OJK untuk lebih melindungi masyarakat, melayani masyarakat, dan memberikan literasi kepada masyarakat terkait pinjaman *online* (pinjol). “Khususnya bimtek (bimbingan teknis) yang banyak masyarakat terlena (kepada pinjol) harus diberikan literasi, pemahaman, edukasi, sehingga masyarakat Lampung dan masyarakat pada umumnya sadar bahwa (pinjol) ini legal, bahwa ini *enggak* boleh, bahwa ini boleh,” saran Fauzi lebih lanjut.

Kemudian untuk kinerja Himbara, dirinya menilai kinerja terkait KUR dan UMKM sudah bagus. Namun dengan potensi pertanian Lampung yang sangat baik, keterlibatan Himbara masih perlu ditingkatkan. “Bank pemerintah BRI, Mandiri, BTN dan BNI itu mengarahkan kepada pertanian. Karena Lampung ini adalah salah satu penyumbang sektor pertanian tertinggi,” pungkas legislator dapil Sumatera Selatan I tersebut. ■ hal/sf



Anggota Komisi XI DPR RI Fauzi H. Amro. Foto: Hira/invl

# Anis Byarwati: Komisi XI Komitmen Perbaiki Kondisi Perekonomian NTT



Anggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati. Foto: Hanum/nvl

**A**nggota Komisi XI DPR RI Anis Byarwati mengatakan Komisi XI DPR RI akan berkomitmen untuk membuat kondisi perekonomian Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) bisa lebih baik lagi ke depannya. Menurutnya, kondisi-kondisi riil di lapangan perlu untuk ditindaklanjuti lagi.

“Memang kondisi di NTT ini memerlukan suatu pola kerja yang betul-betul menyeluruh termasuk pemerintah daerah juga bagaimana bisa meningkatkan

”

**BERDASARKAN DATA DARI BPS, PROVINSI NTT MEMANG BELUM ADA PERKEMBANGAN. SALAH SATU CONTOHNYA, NTT ITU TERMASUK KE DALAM PROVINSI NOMOR 3 TERMISKIN DI INDONESIA**

kualitas masyarakatnya. Karena bagaimanapun NTT ini masih memiliki kondisi ketimpangan generasi yang juga masih tinggi, kualitas SDM, serta kemiskinan juga tertinggi,” ungkap Anis usai mengikuti pertemuan Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi XI DPR RI dengan sektor perbankan NTT, di Labuan Bajo, Senin (21/2).

Meskipun demikian, politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menambahkan bahwa dari paparan yang sudah disampaikan oleh mitra pada pertemuan tersebut telah menunjukkan pekerjaan yang maksimal. Namun kembali lagi, jika melihat data yang diberikan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), menyatakan bahwa NTT masih belum bisa dikatakan pulih sepenuhnya.

“Berdasarkan data dari BPS, Provinsi NTT memang belum ada perkembangan. Salah satu contohnya, NTT itu termasuk ke dalam Provinsi nomor 3 termiskin di Indonesia, dan ini berlaku sudah puluhan tahun. kemudian bagaimana yang dilakukan pemerintah daerah seperti Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu juga ternyata belum meningkat,” ujar Anis lebih lanjut.

Namun di samping itu, legislator daerah pemilihan (dapil) DKI Jakarta I itu pun menegaskan kepada seluruh mitra yang hadir, bahwa Komisi XI DPR RI dalam hal ini menekankan kepada para *stakeholder* untuk bisa bekerja lebih keras lagi dan mengerahkan segala upaya dalam meningkatkan kondisi NTT menjadi lebih baik lagi.

“Saya rasa kita (Komisi XI DPR RI dan seluruh mitra yang hadir) di sini semua punya komitmen. Tugas kita semua adalah bagaimana mensejahterakan masyarakat, bagaimana bisa mengangkat termasuk taraf hidup yang lebih layak,” pesan Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI tersebut. ■ hnm/sf

# Said Abdullah Tawarkan 7 Langkah Atasi Tata Kelola Pangan Nasional

**K**etua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah menyarankan tujuh langkah kepada pemerintah agar bisa menangani permasalahan tata kelola pangan rakyat saat ini. Di tengah problem kelangkaan pangan yang sempat terjadi di beberapa wilayah di Indonesia. Pertama, menurut Said, pemerintah perlu menyusun peta jalan kebijakan pangan nasional secara akurat. Kedua, pemerintah harus membuat sistem logistik nasional yang terintegrasi, terkoneksi dengan berbagai pihak, baik di pusat dan daerah, dengan pendekatan lintas sektor.

“Sistem itu harus mampu memberikan peringatan dini atas potensi persoalan rantai pasok pangan. Pembangunan sistem logistik pangan ini sekaligus memudahkan pendataan bagi berbagai instansi untuk pajak, bea dan cukai, dan lain-lain,” kata Said dalam keterangan tertulisnya, Rabu (9/3).

Ketiga, jelas Said, perlu adanya penguatan peran dan fungsi badan logistik seperti intervensi Bulog terhadap pasar perlu terus diperkuat. Penguatan Bulog, dapat dilakukan dengan meningkatkan volume dan keragaman stok pangan strategis tentu juga harus ditopang pula dengan sistem pergudangan baik modern, dan kecepatan distribusi yang efisien. Langkah keempat, pelaksanaan operasi pasar sebagai penegakan hukum, pemerintah perlu melibatkan peran serta masyarakat luas.

Sementara itu, legislator dapil Jawa Timur XI itu menyarankan, Kementerian Perdagangan perlu meniru kepolisian dalam menjaga keamanan kampung

dengan membentuk siskamling. “Dalam hal pengawasan pangan rakyat, sangat baik bila Kementerian Perdagangan memiliki kekuatan rakyat yang terorganisir berperan serta aktif dalam pengawasan tata kelola pangan,” sebut Said lebih lanjut.

Kelima, Kementerian Perdagangan perlu mengumumkan secara terbuka kepada publik perusahaan perusahaan yang tidak mematuhi *Domestic Market Obligation* (DMO) kelapa sawit. Serta melakukan penegakan hukum atas pelanggaran terhadap ketidakpatuhan DMO itu. Langkah tegas menurut Said, perlu diambil oleh pemerintah agar dikemudian hari tidak ada lagi perusahaan perusahaan yang bisa berada di atas pemerintah.

Selanjutnya, untuk Anggota Komisi XI DPR RI tersebut langkah keenam, karena tidak efektifnya kebijakan DMO dan DPO (*Domestic Price Obligation*) di lapangan, dan masih terus membumbung tinggi serta kelangkaan minyak goreng di banyak daerah, pemerintah harus menghentikan sementara ekspor kelapa sawit setidaknya sebulan agar ada kepatuhan sejumlah produsen besar untuk memenuhi kebutuhan sawit domestik.

Terakhir, Anggota Komisi XI DPR RI menerangkan bahwa pemerintah perlu terus mengembangkan diversifikasi pangan rakyat. Kasus kelangkaan minyak goreng ini

menunjukkan minyak goreng dari sawit menjadi produk yang seolah tidak ada substitusinya. “Ketergantungan kita terhadap minyak goreng sawit sangat tinggi. Padahal kita juga mengenal *virgin coconut oil* (VCO) atau minyak kelapa yang lebih sehat dari minyak sawit,” ucap Said.

Bahkan ia menilai, rakyat Indonesia sangat memungkinkan untuk mengurangi konsumsi minyak goreng karena mewarisi tradisi memasak dengan merebus dan membakar yang dipandang lebih sehat. “Kelompok masyarakat perlu mengembangkan tradisi memasak itu. Industri juga dapat masuk untuk mengisi market dengan berbagai alat untuk merebus dan membakar bahan makanan dengan cara praktis,” pungkash Said. ■ ah/sf



Ketua Banggar  
DPR RI  
MH Said Abdullah.  
Foto: Runi/nvl

# GKSB DPR Dorong Pemerintah Indonesia Buka Dialog Bagi Ukraina-Rusia



Ketua GKSB DPR RI-Parlemen Ukraina Sugeng Suparwoto saat menerima Duta Besar Ukraina untuk Indonesia Vasyl Hamianin. Foto: Ojil/mvl

**K**etua Grup Kerja Sama Bilateral (GKSB) DPR RI-Parlemen Ukraina Sugeng Suparwoto mendorong terwujudnya perdamaian antara Rusia dengan Ukraina. Menurut Sugeng, sebagai negara non-blok seperti Indonesia dapat berperan sebagai mediator antara Rusia-Ukraina yang kini sedang mengalami konflik. Terkait hal ini, Pemerintah Indonesia diminta berperan aktif membuka dialog bagi kedua negara.

“Kami (parlemen) mendorong Pemerintah Indonesia untuk berperan aktif, segera melakukan peran aktif antar dua negara ini, seperti membuat forum khusus, lebih cepat lebih baik,” ungkap Sugeng usai menerima Duta

”

**SERANGAN MILITER  
RUSIA TERHADAP  
UKRAINA MEMBERIKAN  
DAMPAK BAGI  
PERDAMAIAN DUNIA  
DAN STABILITAS  
EKONOMI GLOBAL.**

Besar Ukraina untuk Indonesia, Vasyl Hamianin di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (2/3).

Sugeng meminta agar seluruh pihak terkait dapat mengedepankan diplomasi

dan dialog dalam menyelesaikan berbagai masalah. Dia mengingatkan, agar aspek kemanusiaan harus menjadi pertimbangan utama dalam penyelesaian konflik Rusia-Ukraina. Dia menjelaskan, dalam situasi perang, masyarakat sipil akan menanggung dampak terbesar. Di samping itu, serangan militer Rusia terhadap Ukraina memberikan dampak bagi perdamaian dunia dan stabilitas ekonomi global.

Sugeng menambahkan, DPR RI selama ini memiliki hubungan yang baik dengan Parlemen Ukraina maupun Parlemen Rusia. Terkait hal ini, lanjut dia, DPR bersedia menjadi mediator dialog melalui jembatan diplomasi. “Kami di DPR akan segera mengundang Dubes Rusia di Indonesia, agar kita semua memiliki titik pemahaman bersama bahwa penggunaan kekuatan militer untuk kepentingan apapun tidak dibenarkan. Dalam era modern saat ini, segala sesuatu bisa diselesaikan dengan dialog,” imbuhnya.

Sebelumnya, politisi Partai NasDem ini juga menyampaikan rasa duka cita mendalam atas apa yang terjadi di Ukraina saat ini. “*Our thoughts and prayers are with the Ukrainian*. Tentu kita berharap semoga keadaan akan semakin membaik ke depannya, seiring dengan berbagai upaya diplomasi yang dilakukan oleh berbagai pihak, baik melalui forum multilateral maupun bilateral antara Rusia dan Ukraina,” ujar Sugeng kepada Dubes Ukraina.

Sementara itu, Duta Besar Ukraina untuk Indonesia H.E. Mr. Vasyl Hamianin menginginkan sesegera mungkin berakhirnya konflik antar kedua negara. Vasyl menyatakan Ukraina tidak menginginkan adanya perang dan terkait hal itu Ukraina siap sedia untuk negosiasi dan berdialog.

“Hal seperti ini tidak pernah terjadi di Ukraina, sekarang kami bersatu sebagai sebuah bangsa, semua partai, semua agama, semua kalangan, semua bersatu. Mulai dari anak-anak, orang dewasa semua bersatu. Jadi kami siap untuk berdialog,” kata Vasyl kepada Sugeng. ■ ann/sf



# Puteri Komarudin: Selaraskan Kepentingan Pemuda di Kota dan Desa



Anggota BKSAP DPR RI Puteri Komarudin. Foto: Ist/nvl

**P**rovinsi Jawa Barat selaku *Co-Chair* Urban 20 (U20) dan dalam rangka mendukung Presidensi G20 Indonesia 2022, menyelenggarakan acara *Urban 20 Talks* dengan tajuk “Kota, Desa dan Pemuda di Era Digital”, pada Kamis (24/2) lalu. Hadir mewakili pemuda Indonesia, Ketua Delegasi Indonesia Y20 Italia 2021 sekaligus Anggota Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Puteri Komarudin suarakan urgensi untuk selaraskan kepentingan pemuda di kota dan desa.

“Pemuda yang tinggal di perkotaan dan pedesaan memang memiliki kebutuhan yang berbeda tetapi bukan berarti penanganannya harus dilakukan terpisah. Keduanya memiliki keterkaitan dan interaksi, baik dari segi ekonomi maupun mobilitas yang saling mempengaruhi. Justru, kita perlu mengutamakan integrasi dan meningkatkan interaksi antara kedua sisi ini,” ungkap Puteri dalam keterangan persnya, Selasa (1/3).

U20 merupakan bagian dari *engagement groups* KTT G20 bagi para pemimpin daerah di kota-kota negara G20. Puteri juga mengimbau agar pemerintah negara G20 untuk terus mengurangi kesenjangan digital bagi pemuda sehingga bisa menangkap potensi ekonomi digital secara maksimal. Menurutnya pemuda rentan terdampak pandemi Covid-19 secara disproportional.

“Dari segi pendidikan, 65 persen pemuda kehilangan pembelajaran (*learning loss*). Antar negara G20 juga masih terjadi kesenjangan digital. Belum lagi, pelemahan ekonomi juga menyulitkan pemuda untuk mendapatkan penghasilan. Karenanya, pemerintah G20 perlu atasi kesenjangan ini dan pastikan pemuda memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi bagi pembangunan,” tutur Anggota Komisi XI DPR RI tersebut.

Menutup keterangannya, Puteri mendorong agar delegasi Indonesia



## **AGAR DELEGASI INDONESIA PADA FORUM KEMUDAAN Y20 2022 TERUS MEMPERJUANGKAN KEPENTINGAN PEMUDA**

pada forum kepemudaan Y20 2022 terus memperjuangkan kepentingan pemuda dalam empat agenda prioritas yaitu Ketenagakerjaan Pemuda, Transformasi Digital, Planet yang Berkelanjutan dan Layak Huni, serta Keberagaman dan Inklusi.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua I Bidang Sherpa Track G20 Indonesia Airlangga Hartarto turut mengungkapkan peran pemuda untuk dorong kemajuan ekonomi digital Indonesia. “Dalam 15 tahun ke depan, Indonesia butuh 600.000 orang talenta digital per tahun atau total 9 juta orang. Untuk itu, pemerintah pusat melakukan kegiatan peningkatan SDM di kota dan desa agar adaptif terhadap kebutuhan. Pemprov Jabar dan DKI juga harap persiapan ekosistem digitalisasi untuk dorong pemuda bekerja di sektor digital,” ungkap Menko Airlangga. ■sf

# Setjen DPR Bahas Mekanisme *Handling* Delegasi IPU dengan Otoritas Bandara Soetta

**S**ekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar didampingi beberapa pejabat Sekretariat Jenderal DPR RI menggelar rapat koordinasi dengan Executive GM Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Agus Haryadi, Kementerian Kesehatan, Kementerian Luar Negeri, dan Otoritas Pengamanan Bandara, terkait mekanisme *handling* kedatangan dan kepulangan delegasi Inter-Parliamentary Union (IPU) ke-144 pada 20-24 Maret 2022 mendatang, di Nusa Dua, Bali.

“Sebagaimana kita ketahui, pemerintah berencana untuk menghapuskan karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri (PPLN) di Provinsi Bali. Dengan perkembangan ini kami pun telah menyarankan kepada delegasi IPU seluruh dunia untuk menggunakan *direct international flight* (penerbangan internasional langsung) ke (Bandara) Ngurah Rai, namun hingga saat ini jumlah penerbangan tersebut masih terbatas, sehingga masih besar kemungkinan banyak delegasi yang akan transit di Jakarta,” kata Indra di Bandara Soetta, Rabu (2/3).

Indra menyampaikan, untuk kegiatan IPU tersebut jumlah peserta yang akan hadir diperkirakan sekitar 1000 sampai dengan 1500 orang. “Pertemuan terakhir Bulan November di Madrid itu dihadiri oleh 1200 orang, terdiri dari 179 negara atau pimpinan parlemen bersama delegasinya. Sampai dengan tadi malam, delegasi-delegasi dari 87 negara sudah mengkonfirmasi untuk berpotensi hadir. Tentu ini berkaitan dengan bagaimana *handling* kita, terutama dalam pelaksanaan dan



Sekjen DPR RI Indra Iskandar saat mengikuti rakoor. Foto: Jaka/nvl

protokol kesehatan sehingga mereka *make sure* perjalanan dari negara masing-masing menuju Bali itu tidak terlalu rumit,” jelasnya.

Beberapa hal yang menjadi catatannya antara lain yakni mengenai protokoler dan *handling* bagi delegasi VIP dan biasa. Yang disebut dengan delegasi VIP adalah Ketua Parlemen dan Ketua Deputy Parlemen dari masing-masing negara. “Sebagaimana diketahui bahwa perjalanan Pimpinan DPR di luar negeri diperlakukan sama seperti kepala negara atau Presiden, sehingga kita perlu lebih cermat dalam menanganinya,” tandasnya.

Hal lain yang juga menjadi catatan yaitu mengenai alur pengecekan persyaratan dan dokumen, alur dan pelaksanaan *swab* PCR, penggunaan

ruang tunggu, dan *handling* delegasi yang transit ke Bali di hari yang sama. “Jika itu ada selisih jam tentu ada delegasi-delegasi yang harus dipersiapkan untuk terbang kembali dan tentu kita harus memfasilitasi dalam waktu beberapa jam sampai dengan terbang,” kata Indra.

Selain itu juga terkait dengan sarana fasilitas WiFi bagi delegasi di Bandara Soekarno-Hatta agar bisa lebih mudah diakses dan cepat. Demikian pula soal *handling* bagi delegasi yang menginap di hotel sebelum melanjutkan penerbangan ke Bali. “Juga tentang penanganan dan SOP jika ditemukan kasus positif pada delegasi dan mekanisme penanganan, serta pengamanan bagi delegasi,” pungkas Indra dalam catatannya. ■ dep/sf

# Badan Keahlian DPR Gelar FGD UU Cipta Kerja dengan FEB UGM

**B**adan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI bekerjasama dengan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM) menggelar *Focus Group Discussion* (FGD) Konsultasi Publik bersama terkait Arah Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Atas Pengujian Formil.

Kepala BK DPR RI Inosentius Samsul dalam sambutannya secara daring menyampaikan, FGD ini diselenggarakan dalam rangka mencari masukan, saran atau tanggapan terkait perubahan UU Ciptaker ke depan. “Badan Keahlian merasa penting untuk dilakukan FGD agar dapat memunculkan diskusi yang membangun yang dapat memberikan pandangan, pendapat, dan sumbangsih pemikiran dari beragam sudut pandang dari sisi akademis mengenai arah kebijakan terhadap

perubahan UU Cipta Kerja ke depan,” ujar Sensi, sapaan akrab Inosentius Samsul, Jumat (18/2).

Sensi menjelaskan, dalam putusan tersebut sesungguhnya MK memberi kesempatan kepada pembentuk UU untuk memperbaiki agar sesuai dengan asas-asas dan tata cara pembentukan undang-undang terutama asas keterbukaan dan partisipasi publik. Namun, konsekuensi hukum dari putusan MK tersebut tidaklah sederhana, karena ada beberapa faktor yang perlu menjadi perhatian khususnya bagi pembentuk UU.

Pertama, sebelum melakukan perbaikan UU Ciptaker harus diberikan legitimasi hukum terlebih dahulu terhadap metode pembentukan UU dengan *Omnibus Law*. Kedua, perbaikan UU Ciptaker perlu dilakukan dengan memperhatikan asas-asas pembentukan undang-undang

yang baik, khususnya asas keterbukaan dan partisipasi publik yang menurut pandangan MK tidak dilakukan dengan baik oleh pembentuk UU.

Ketiga, masih kata Sensi, MK juga menyatakan agar menanggukkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas dalam menerapkan UU Ciptaker, tetapi MK tidak memberikan parameter atau tolok ukur yang bersifat strategis dan berdampak luas tersebut dalam implementasi UU Ciptaker.

Sementara UU Cipta Kerja diundangkan dengan maksud untuk penyederhanaan pengaturan dalam peraturan perundang-undangan yang dianggap terlalu rumit dan peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Dengan demikian, dapat dipastikan bahwa implementasi dari hampir seluruh pasal dalam UU Cipta Kerja akan bersifat strategis dan memiliki dampak yang luas bagi masyarakat.

“Karena itu, diharapkan dapat ditarik suatu kesimpulan bagaimana arah kebijakan pengaturan yang ideal dalam UU Cipta Kerja yang nantinya dapat menjadi pertimbangan pembentuk undang-undang dalam menindaklanjuti Putusan MK tersebut,” imbuh Sensi.

Dalam kesempatan yang sama, Dosen Fakultas Hukum UGM, Hendry Julian Noor menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembentukan kebijakan publik yang berdampak pada masyarakat luas, termasuk isu-isu ketenagakerjaan. “Itu adalah isu-isu sensitif dan banyak menyentuh masyarakat, sehingga kemudian sangat perlu untuk melakukan asas partisipasi agar sesuai juga dengan perintah MK dalam pertimbangannya,” kata Hendry. ■ ann/sf



Kepala BK DPR RI  
Inosentius Samsul.  
Foto: Jaka/nvl

# Setjen DPR Lepas Empat Pegawai Purnabakti



Sekjen DPR RI Indra Iskandar foto bersama usai pelepasan pegawai pensiun Setjen DPR RI. Foto: Jaka/nvl

**S**ekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan atas pengabdian dan loyalitas kepada empat Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang selama ini mengabdikan diri di Setjen DPR RI hingga memasuki masa purnabakti terhitung mulai 1 Maret 2022. Empat pegawai yang memasuki masa pensiun tersebut di antaranya Deputy Bidang Persidangan, Damayanti; Arsiparis dari Penyelia Bagian Arsip, Acih; Pengelola Data Bagian Keanggotaan dan Kesekretariatan Fraksi, Budi Mulyanto; dan, Perisalah Legislatif Ahli Madya Biro Persidangan I, Mitra Anindyarina.

“Tradisi di Sekretariat Jenderal ini setiap ada yang pensiun di akhir bukan selalu kita lepas dengan acara upacara yang sangat istimewa. Ini adalah cara kami menghormati kolega, rekan-rekan dari Sekretariat Jenderal yang memasuki masa purna tugas karena tentu pengabdiannya, loyalitas kepada organisasi yang luar biasa. Sehingga kami selalu melakukan pelepasan setiap ada yang pensiun itu dengan

cara yang sangat baik,” ujar Indra usai pelepasan pegawai pensiun Setjen DPR RI, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (1/3).

Indra menjelaskan, mekanisme yang ada dalam Setjen DPR RI saat ini sudah baik dan sangat profesional. Saat ini telah banyak generasi-generasi baru, begitupun dengan kepala-kepala biro. Dirinya optimis, meski Deputy Persidangan sebelumnya telah purna tugas, Setjen DPR RI akan tetap bekerja baik dan bahkan lebih baik lagi.

“Saya kira semangatnya sekarang ini kan memasuki isu parlemen modern, isu reformasi birokrasi, untuk pelayanan-pelayanan kepada dewan, Sekretariat Jenderal selaku *supporting system* dewan terus menyempurnakan setiap hal yang berkaitan dengan dukungan kepada dewan. Itu kami lakukan akan menjadi alat ukur kami, KPI (key performance index) kami untuk pelayanan kepada dewan,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Damayanti juga mengucapkan rasa terima kasih sekaligus permohonan maaf telah mendapat kesempatan dan

dukungan kerja sama ketika dirinya bekerja sebagai Deputy Persidangan DPR RI. Dirinya berharap, seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Setjen DPR RI dapat lebih maju, dapat meningkatkan kapasitasnya supaya menjadi kuat dan selalu terdepan. Selain itu, dirinya menjelaskan posisi Setjen DPR RI dalam bekerja mendukung Dewan dapat disebut sulit-sulit gampang.

“Pekerjaan di Deputy Persidangan sebetulnya biasa-biasa saja. Tetapi karena di sini banyak komisi, banyak fraksi, banyak juga anggotanya jumlahnya 575 orang, Setjen DPR RI harus menjadi pihak yang bijaksana. Karena gini, kalau salah satu fraksi dengan fraksi yang lain itu ribut atau anggota satu dengan yang lain itu ribut yang susah tuh siapa? Kita sendiri. Jadi kita harus bisa bijaksana, berintegritas dan bisa adil kepada semua pihak Insya Allah semua berjalan lancar dan yang penting komunikasi, komunikasi, dan komunikasi,” pesan Maya kepada pejabat dan pegawai Setjen. ■ hal,ps/sf

# Tuntutan Pelayanan Makin Tinggi, Biro Protokol dan Humas Setjen DPR Kembangkan *Soft Skill* Pegawai

**K**epala Biro Protokol dan Humas Sekretariat Jenderal DPR RI Suratna mengatakan, tuntutan layanan keprotokolanan kepada Anggota DPR RI semakin lama semakin tinggi. Maka dari itu, perlu sebuah pengembangan *soft skill* para pegawai protokol dalam melayani 575 Anggota Dewan. Namun, Ratno, sapaan akrab Suratna mengingatkan agar tuntutan itu tidak

dijadikan beban dalam menjalankan tugas dan fungsi keprotokolanan.

“Kalau pengetahuan tentang *hard skill*, saya kira teman-teman sudah relatif hafal tentang UU Keprotokolanan. Tapi yang perlu dikembangkan adalah *soft skill*-nya, bagaimana mengasah mental baja yang tidak mudah mengeluh dan harus siap setiap saat. Apalagi dengan total Anggota DPR berjumlah 575 orang, tentu punya

tuntutan beragam dan yang paling penting kita harus menjaga marwah kehormatan anggota dan lembaga,” jelas Ratno saat memberikan sambutan dalam Bimbingan Teknis Keprotokolanan di Bogor, Jawa Barat, Jumat (4/3).

Menurut Ratno, untuk meningkatkan layanan keprotokolanan di DPR, pihaknya juga telah memperluas layanan keprotokolannya, baik itu udara, laut, maupun darat. Untuk layanan udara, yang awalnya hanya bekerjasama dengan 16 bandara, sekarang sudah 34 bandara di seluruh Indonesia melalui kerja sama dengan PT Garuda Angkasa.

“Belum lama ini juga kita telah bekerjasama dengan PT KAI dan Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (ASDP) setidaknya ada 15 penyebrangan nasional yang kita kerjasamakan. Semoga dengan perluasan layanan keprotokolanan ini, para Anggota DPR akan terlayani dengan baik. Ini adalah ikhtiar kita untuk meningkatkan pelayanan, walaupun sempat memang survei layanan keprotokolanan turun 2 poin, tentu ini perlu kita evaluasi dan selidiki apa yang membuat nilai kita turun,” imbuhnya.

Dalam sambutannya, Ratno juga menyampaikan, kemampuan *soft skill* protokoler dalam berkomunikasi dan mental spritual harus terus dijaga dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi. Dinamika dalam bertugas maupun tuntutan permintaan adalah hal yang wajar. Namun Ratno mengingatkan yang penting jangan sampai abai atau lalai dalam menjalankan tupoksinya.

“Kalau teman-teman ada masalah terkait *soft skill*, ini yang memang perlu terus dikembangkan. Termasuk mentalnya bagaimana supaya ketangguhan mental ini selalu terbangun, pola komunikasi dengan Anggota Dewan itu menjadi kunci utama karena ini menjadi kemampuan paling dasar ketika kita melakukan komunikasi saat berinteraksi dengan Anggota Dewan. Kami selaku penanggung jawab, akan selalu meng-*upgrade* kemampuan *soft skill* teman-teman agar bisa bekerja lebih nyaman,” tutup Ratno. ■ jk/sf



Kepala Biro Protokol dan Humas Sekretariat Jenderal DPR RI Suratna saat memberikan sambutan pada Bimtek Keprotokolanan di Bogor, Jawa Barat. Foto: Jaka/mvl

# Dony Maryadi Oekon Minta Pemerintah Terus Kawal Isu Kenaikan Harga BBM



Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon berfoto bersama Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva. Foto: Oji/mvl

**B**ersitegangnya Ukraina dan Rusia, menjadi buntut dari melonjaknya harga minyak bumi. Merespon hal tersebut, Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Dony Maryadi Oekon menegaskan bahwa Pemerintah Indonesia harus bertindak secara transparan kepada masyarakat terkait isu kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG. Menurutnya, situasi ini dapat menjadi beban yang berat bagi Indonesia.

“Ini beban yang sangat berat, karena kita masih mengkondisikan harga tidak terikat kepada harga minyak

dunia. Akhirnya, pemerintah harus mengeluarkan dana untuk subsidi BBM. Ini beban yang sangat berat untuk kita,” ungkap Dony usai mengikuti pertemuan Pimpinan dan Anggota Komisi VII DPR RI dengan Duta Besar Rusia untuk Indonesia Lyudmila Georgievna Vorobieva, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (7/3).

Politisi PDI-Perjuangan itu menuturkan, pemerintah dan Pertamina diharapkan bisa menjelaskan kepada masyarakat mengenai situasi terkini. Terlebih menurut Dony, pemerintah perlu menggencarkan fungsi kontrolnya

terkait pergerakan harga BBM dan energi agar tidak terjadi permainan harga di masyarakat. “Fungsi pemerintah juga harus mengontrol harga. Jadi, beban BBM, beban energi terhadap produk yang mereka jual itu berapa besar? Jika kenaikannya bertambah dari harga cuma naik 2 persen, ya sepantasnya naik cuma 2 persen. Jangan jadi 30 persen dari harga. Itu tidak pantas,” tegas Dony.

Komisi VII DPR RI, lanjutnya, juga akan terus mengawal pemerintah mengenai isu kenaikan harga ini, dengan tujuan agar hal tersebut tidak menjadi beban di masyarakat dan menghindari efek domino kenaikan harga. Dony menjelaskan, pihaknya akan mempertanyakan dan mengevaluasi kepada pemerintah apabila adanya kenaikan harga. “Masalah kenaikan harga minyak ini sudah global, sudah mendunia. Jadi, memang kita sama-sama harus melihat bahwasanya ini (Ukraina-Rusia) harus berdamai supaya kita tidak terkena dampak,” ungkap Dony.

Berkaca pada situasi saat ini, Dony berharap dengan kenaikan harga serta keterbatasan dalam ketersediaan energi yang berbasis fosil ini, pemerintah dapat senantiasa menjaga, mendorong serta mengangkat sektor energi terbarukan yang kini sedang gencar menjadi pilihan sumber energi alternatif lain. Selain itu, ia juga berharap agar pemerintah bersikap transparan kepada masyarakat terkait situasi terkini. “Kita berharap kita bisa menjelaskan kepada masyarakat situasi terkini, agar masyarakat tahu dan tidak merasa dibohongi nantinya,” tutup legislator dapil Jabar XI itu. ■ ps,hal/sf



Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto foto bersama usai pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Parlemen Denmark. Foto: Ojji/nvl

# Komisi VII: Beralih ke EBT Bukan Pilihan, Tapi Keharusan

**K**etua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto menegaskan bahwa peralihan dari energi fosil ke energi baru terbarukan (EBT) bukanlah sebuah pilihan, tapi merupakan keharusan. Hal itu ia sampaikan usai pertemuan antara Komisi VII DPR RI dengan komite yang membidangi sektor energi dari Parlemen Denmark.

“Memasuki EBT itu bukan pilihan, tetapi keharusan. Jadi kita sudah tidak bisa menunda lagi. Apalagi potensi EBT negara ini sangat besar,” ujar Sugeng usai pertemuan di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Selasa (8/3). Ia juga menyebutkan bahwa Parlemen Denmark cukup *concern* terhadap Indonesia sebagai negara

yang strategis ketika menyangkut pembahasan energi.

Untuk itu, politisi Partai NasDem itu menyebutkan, pertemuan Komisi VII DPR RI dengan Parlemen Denmark sebagai bagian dari diskusi tentang persoalan energi. Meskipun Denmark secara wilayah tidak besar, tetapi pengalamannya dalam mengembangkan EBT layak dijadikan bahan pertimbangan bagi Indonesia.

“Dalam diskusi-diskusi tadi tercermin bahwa Denmark juga sangat mendukung Indonesia memasuki transisi energi dari fosil menuju EBT, dengan tanpa mengabaikan begitu saja energi fosil,” sebut Sugeng. Yang menjadi perhatian utama dalam persoalan transisi energi ini bagaimana

prosesnya dapat menekan emisi yang berdampak bagi lingkungan.

“Denmark memiliki pengalaman selama ini dan juga teknologinya yang maju di bidang energi. Maka itulah diharapkan ke depan akan ada kerjasama-kerjasama konkret yang mendorong Indonesia menuju EBT,” urai legislator daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah VIII tersebut.

Lebih lanjut Sugeng menerangkan bahwa energi fosil memang sudah menjadi tantangan baik dari sisi sebagai komoditas dengan harga sangat fluktuatif maupun konsumsinya yang juga banyak. Sugeng berharap ke depannya Indonesia mampu menyiapkan energi yang handal dan mandiri dengan tetap mempertahankan pemeliharaan lingkungan hidup.

Kehadiran Parlemen Denmark diwakili Ketua Komite Energi, Rasmus Helveg Petersen. Turut hadir dalam pertemuan itu, Anggota Komisi VII DPR RI Mercy Christy Barends dan Anggota Komisi VII DPR RI Dyah Roro Esti, serta Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dan Direktur Utama PT Pertamina Power Dannif Danusaputro. ■ [ah,uca,ps/sf](#)

# The 144 IPU

(Inter-Parliamentary Union)  
Assembly & Related Meetings

*“Getting to Zero: Mobilizing Parliaments  
to Act on Climate Change”*

